



PENGENDALIAN TAMBANG PASIR ILEGAL DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT DEMI KEBERLANJUTAN EKOSISTEM PANTAI WAKATOBI

Safrizal¹, Anak Agung Sagung Alit Widyastuty^{2*}

^{1,2}, Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas PGRI Adi Buana, Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 22, 2024

Revised April 29, 2024

Accepted April 29, 2024

Available online April 30, 2024

Kata Kunci:

karakteristik Penambang pasir, pengaruh sosial ekonomi, Upaya pengendalian.

Keywords:

characteristics of sand miners, socio-economic effect, control efforts

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas PGRI ADI BUANA SURABAYA.

ABSTRAK

Pantai Kampa merupakan pantai yang berlokasi di kepulauan Tomia di Desa Dete kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi dengan panjang $\pm$ 929 m dengan luas 7,16 Ha. Kampa merupakan kawasan yang masuk pada zona perikanan tangkap, yang melarang adanya kegiatan penambangan pasir ilegal. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui karakteristik aktivitas penambangan pasir ilegal dan pengaruh adanya kegiatan penambangan pasir ilegal pada masyarakat, serta upaya pengendalian penambangan pasir ilegal di Pantai Kampa berdasarkan perspektif masyarakat. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah *mixed methods* yaitu deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Teknik analisis prosentase dan analisis AHP digunakan untuk mengolah data hasil wawancara, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner pada Masyarakat sekitar dan pelaku penambangan ilegal di Pantai Kampa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik penambangan Pasir ilegal di pantai Kampa proses penggaliannya secara tradisional dengan memakai alat seadanya mulai dari sekop dan karung beras sebagai wadah. Pengaruh kegiatan penambangan pasir ilegal memiliki cukup pengaruh terhadap keberlangsungan dan kemajuan Desa Dete sebesar 82%, dan upaya pengendalian penambangan pasir ilegal di Pantai Kampa dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan mengembangkan dan melindungi potensi wisata Pantai Kampa.

ABSTRACT

Kampa Beach is located on the Tomia Islands in Dete Village, East Tomia District, Wakatobi Regency is $\pm$ 929 m long with an area of 7.16 Ha. Kampa Beach is included in the capture fisheries zone, which prohibits illegal sand mining activities. This research aims to determine the characteristics of illegal sand mining activities. The effect of illegal sand mining activities on the community, and efforts to control illegal sand mining on Kampa Beach based on the community's perspective. The method used in this study was mixed methods, namely qualitative descriptive and quantitative descriptive. Percentage analysis techniques and AHP analysis were used to process data from interviews, documentation, and distribution of questionnaires to local communities and illegal mining perpetrators on Kampa Beach. The results of this research showed that the characteristics of Ilegal Sand mining on Kampa Beach were the traditional excavation process using improvised tools starting from shovels and rice sacks as containers. The effect of illegal sand mining activities has quite an influence on the sustainability and progress of Dete Village by 82%, and efforts to control illegal sand mining on Kampa Beach by providing outreach to the community, and developing and protecting the tourism potential of Kampa Beach.

1.1 PENDAHULUAN

Penambangan ilegal merupakan penambangan yang dilakukan tanpa memiliki perizinan

*Corresponding author.

E-mail addresses: sagungalit@unipasby.ac.id

tambang, kegiatan tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkan adalah berupa lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan yang berakibat pada penyusutan kemiskina, sedangkan dampak negative yang timbulkan adalah polusi air, udara dan kecelakaan kerja, karena banyak pekerja yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai [1]. Namun penambangan yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang RTRW merupakan salah satu yang dilarang/ilegal (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2022). Peraturan Gubernur No 9 Tahun 2018 mencantumkan bahwa Kabupaten Wakatobi masuk pada zona perikanan tangkap (KPU-PT-P-02), sub zona pelabuhan perikanan (KPU-PL-DLK), dan sub zona taman nasional (KK-KKL). Dalam peraturan tersebut juga mencantumkan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada zona perikanan tangkap salah satunya adalah kegiatan pertambangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,

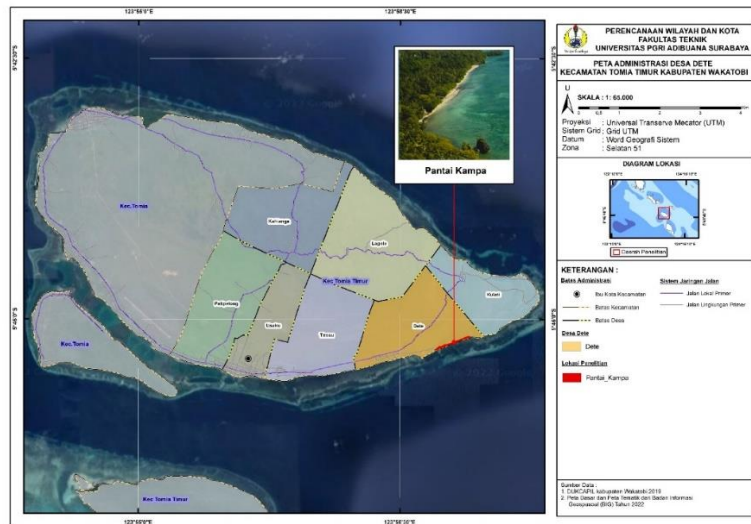
Kawasan Wakatobi merupakan salah satu kawasan strategis prioritas nasional bidang pariwisata [2]. Pantai Kampa berlokasi di kepulauan Tomia Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi. Kegiatan penambangan Pasir ilegal merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan RZWP2P Provinsi Sulawesi Tenggara dan RTRW Kabupaten Wakatobi. Penambangan pasir pesisir merupakan kegiatan memindahkan secara fisik sedimen atau material lain dari pesisir pantai ke lokasi, yang diawali dengan kegiatan pengerukan, kemudian di lanjutkan dengan pengangkutan dan pengumpulan sedimen atau materi lain tersebut ke tempat lain (Radiarta et al, 2018).

Pantai Kampa merupakan kawasan wisata di Desa Dete, dengan adanya kegiatan tersebut perlu dilakukannya upaya pengendalian dimana kegiatan pariwisata sudah pasti mengacu pada hal-hal yang menarik bagi wisatawan untuk berkunjung dan melakukan kegiatan wisata [4]. Namun sangat disayangkan jika kegiatan wisata terganggu dengan kegiatan penambangan pasir ilegal. Penambangan pasir ilegal yang dilakukan di Pantai Kampa merupakan kegiatan yang dilakukan dari tahun 1997, pemerintah telah memberikan himbauan dan teguran namun himbauan tersebut di hiraukan sampai sekarang. maka perlu adanya penelitian tentang Pengendalian Usaha Penambangan Pasir Ilegal Di Pesisir Pantai.

2. METODE PENELITIAN

Pengendalian tambang pasir ilegal dalam perspektif masyarakat demi keberlangsungan ekosistem pantai merupakan penelitian *mix methods* dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pada rumusan masalah satu, menggunakan metode deskripsi kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan segala keadaan secara nyata dilapangan atau di kawasan penambangan pasir ilegal, sedangkan dua dan tiga menggunakan deskriptif kuantitatif dengan pengambilan data wawancara, dokumentasi dan kuesioner [5]. Penelitian kualitatif merupakan metode yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan, sedangkan Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menitik beratkan pada pengukuran dan analisis hubungan sebab-akibat antara bermacam-macam variabel [6].

Ruang Lingkup Penelitian berlokasi di Pantai Kampa Desa Dete Kabupaten Wakatobi. Pantai Kampa memiliki ± 929 m dengan luas Pantai Kampa 7,16 Ha. batas wilayah dapat dilihat pada Gambar 1



Gambar 1. Administrasi Desa Dete 2023

Sumber: hasil kompilasi 2023

Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah dengan variabel yang berbeda. Dalam menentukan tujuan rumusan masalah penelitian menggunakan variabel yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Variabel yang digunakan dalam Penelitian Pengendalian Tambang Pasir Ilegal Dalam Perspektif Masyarakat Demi Keberlanjutan Ecosistem Pantai Kampa Wakatobi

No	Tujuan	Variabel	Sub Variabel
1	Teridentifikasi karakteristik penambangan pasir di Pantai Kampa	Karakteristik aktivitas penambang pasir	a. Metode Penambangan pasir ilegal b. Kondisi perizinan penambang pasir Manajemen pengelolaan
2	Untuk mengetahui pengaruh kegiatan penambangan pasir ilegal di Pantai Kampa	Pengaruh kegiatan penambangan pasir ilegal	a. Tingkat Pendidikan b. Pendapatan c. Mata Pencarian d. Infrastruktur Peraturan Manajemen
3	Teridentifikasi upaya pengendalian penambangan pasir ilegal di pantai kampa	Upaya pengendalian penambangan pasir ilegal	a. Karakteristik Aktivitas Penambangan Pasir Ilegal b. Pengaruh Kegiatan Penambang Pasir Ilegal

Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dan diperoleh responden penelitian ini sebanyak 97 kepala keluarga yang berada di dusun Nikolai yang terdampak secara langsung kegiatan penambangan ilegal di Pantai Kampa. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu secara Primer. Data primer didapatkan melalui wawancara dan penyebaran kuisioner pada kepala dusun Nikolai dan beberapa kepala rumah tangga yang tinggal di dusun Nikolai dan juga para pelaku penambangan ilegal di Pantai Kampa. Selain melakukan wawancara dan penyebaran kuisioner juga melakukan observasi di lokasi penambangan dan juga dusun Nikolai

Teknik Analisis yang digunakan terdapat dua yaitu menggunakan teknik analisis persentase adalah Analisis persentasi dan menggunakan skala *Linkert* yaitu pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang tentang fenomena sosial [7].

Dalam mengidentifikasi pengaruh dari penambangan pasir ilegal di Pantai Kampa, maka memberikan lima alternatif jawaban responden dengan skala satu sampai lima seperti di Tabel 2.

Tabel 2. Skala Linkert

Skala Linkert	Skor
Sangat Berpengaruh	5
Berpengaruh	4
Cukup Berpengaruh	3
Tidak Berpengaruh	2
Sangat Tidak Berpengaruh	1

Sumber : Hasil Komplikasi 2023

Pada rumusan ketiga menggunakan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) merupakan metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur kedalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut [8]. Teknik Analisis AHP digunakan untuk menentukan Prioritas Arah pengendalian penambang ilegal di Pantai Kampa dengan menjelaskan setiap perbandingan yang diperoleh (Widyastuty & Dwiarta, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penyebaran kuisioner dan wawancara kepada kepala dusun, perwakilan kepala keluarga di dusun Nikolai dan juga penambang ilegal di Pantai kampa terbagi menjadi karakteristik penambang pasir ilegal, faktor yang mempengaruhi kegiatan penambangan ilegal dan juga arahan pengendalian kegiatan penambangan pasir ilegal sebagai berikut:

3.1 Karakteristik Penambang Pasir Ilegal di Pantai Kampa

Kegiatan penambangan pasir ilegal di Pantai Kampa dilakukan secara berkelompok ± 19 tim, setiap tim terdiri dari 2- 3 orang. Pemasaran Pasir hasil Penambangan ilegal berskala mikro, karena radius pemasarannya tidak sampai keluar dari Kecamatan Tomia Timur. Para penambang biasanya melakukan aksinya pada jam 11.00 s/d 14.00. hal tersebut dikarenakan pada jam tersebut kondisi pantai sunyi dan air laut surut. Penambangan menggunakan metode pengambilan pasir secara manual (tradisional), dengan menggunakan alat seadanya mulai dari sekop semen dan karung beras sebagai wadah (gambar 2)

Kawasan Pantai Kampa merupakan Kawasan perencanaan yang masuk dalam rencana jangka menengah Desa Dete 2021-2027, dan direncanakan pembanguana pembangunanya sebagai Kawasan Wisata Pantai Kampa. Berdasarkan dari hasil wawancara diketahui bahwa kegiatan penambangan pasir ilegal di Pantai Kampa sudah ada sejak tahun 1997 oleh oknum masyarakat. Kegiatan tersebut sempat berhenti pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 kegiatan tersebut kembali beroperasi pemerintah Desa telah memberikan himbaun larangan terhadap kegiatan penambangan Pasir ilegal di Pantai Kampa, namun himbauan yang diberikan tidak berpengaruh, sampai saat ini kegiatan ini terus berlanjut sampai sekarang.



Gambar 2. Hasil dari kegiatan Penambangan Ilegal 2023

3.2 Pengaruh kegiatan penambangan pasir Ilegal terhadap aspek sosial, ekonomi, infrastruktur dan peraturan manajemen.

Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal di Pantai Kampa merupakan kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Penambangan Pasir Ilegal merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi lahan di kawasan Pantai di Desa Dete Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi.

Latar belakang yang mempengaruhi kegiatan penambangan ilegal yaitu tidak memilikinya pekerjaan yang tetap, sebagai wadah penambah penghasilan, dan kegiatan penambangan pasir ilegal merupakan pekerjaan turun temurun keluarga (warisan orang tua). Untuk mengetahui Pengaruh kegiatan penambangan Pasir Ilegal di Pantai Kampa dilihat dari beberapa aspek yaitu tingkat pendidikan, pendapatan, mata pencaharian, infrastruktur dan peraturan manajemen, dengan menggunakan analisis Persentase dengan teknik skala linker dapat di lihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Komplikasi Dari Hasil Persentase

Pengaruh penambangan pasir ilegal	Persen	Kriteria	Kriteria
Tingkat Pendidikan	70,65 %	60-80	Berpengaruh
Pendapatan	51,03 %	40-60	Cukup berpengaruh
Mata pencaharian	59,92 %	40-60	Cukup berpengaruh
infrastruktur	58,31 %	40 - 60	Cukup berpengaruh
Peraturan manajemen	53,26 %	40 – 60	Cukup berpengaruh

Sumber : Hasil Komplikasi AHP 2023

Berdasarkan Tabel 3 Kegiatan penambangan pasir ilegal yang dilakukan oleh 19 tim penambang Desa Dete. Berdasarkan dari hasil yang didapatkan kegiatan penambangan ilegal didominasi dengan kriteria cukup pengaruh dilihat dari beberapa aspek, dapat dilihat sebagai berikut

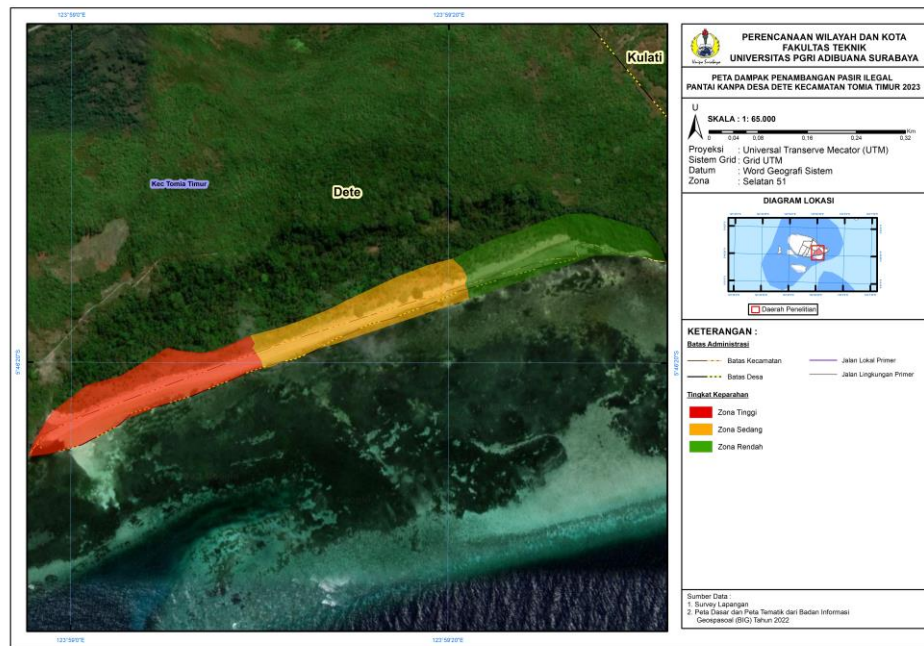
- Tingkat pendidikan**
Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh pada aspek ini berkaitan dengan cara berpikir masyarakat, dari 19 tim penambang pasir ilegal memiliki latar belakang pendidikan yang sama hanya sampai SMP, melihat pembangunan sarana pendidikan di Kecamatan Tomia Timur yaitu Pembangunan tingkat pendidikan SMA didirikan pada tahun 2007, tentu adanya keterlambatan cara berpikir masyarakat dengan adanya kegiatan penambangan pasir ilegal yang dilakukan dari tahun 1997 mengalami pengaruh pada sektor pendidikan pada tahun 2006 di dirikanya TK/Paud dan SMP 3 Timur.
- pendapatan**
Pendapatan cukup pengaruh dari jumlah penghasilan Desa Dete dari Rp.500.000 - Rp.2.000.000,/bulan sehingga mencapai > Rp.2.000.000/bulannya.
- Mata pencaharian**
Kegiatan penambangan ilegal memberikan cukup pengaruh, dengan adanya kegiatan penambangan pasir ilegal memberikan pekerjaan baru, Desa Dete diketahui sendiri mata pencaharian di dominasi oleh nelayan dan petani dengan adanya penambangan pasir ilegal bisa memberikan pekerjaan baru,
- Infrastruktur**
Kegiatan penambangan ilegal memberikan cukup pengaruh berdasarkan dari hasil wawancara oleh perangkat Desa pembangunan Desa Dete, pasir yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur berasal dari hasil penambangan pasir ilegal di Pantai Kampa, sehingga memberikan manfaat tersendiri bagi kemajuan Pembangunan Desa Dete
- Peraturan manajemen**

Kegiatan penambangan ilegal memiliki cukup pengaruh, Pantai Kampa merupakan pantai yang masuk dalam rencana RPJMDes Dete yang langsung diatur dan diawasi langsung oleh perangkat Desa Dete, Pantai Kampa merupakan Kawasan wisata Pantai Kampa.

Berdasarkan dari beberapa aspek di atas kegiatan penambangan pasir ilegal memiliki cukup pengaruh terhadap perkembangan Desa Dete. Pada RPJMDes Dete Pantai Kampa masuk dalam program pengembangan pembangunan Desa yang yang direncanakan perencanaanya dalam mengembangkan potensi wisata di Desa Dete, dengan adanya kegiatan penambangan pasir ilegal di pantai Kampa maka perlu dilakukanya pengendalian usaha penambangan pasir ilegal.

3.3 Pengendalian Pasir Ilegal di Pantai Kampa

Kegiatan penambangan pasir ilegal di panti Kampa, mengakibatkan kerusakan pada daerah Pantai. Pantai kampa memiliki panjang garis Pantai sepanjang 1.071 m dengan luas 7,16 Ha terbagi menjadi 3 zona tingkat kerusakan, yaitu zona kerusakan tinggi, sedang dan rendah (gambar 3). Analisis pemetaan menghasilkan data zona yang mengalami kerusakan tinggi sebesar 36,78%, zona yang mengalami kerusakan sedang sebesar 31,44% dan zona yang mengalami kerusakan rendah sebesar 31,78%. Zona kerusakan tinggi berada di sebelah barat Pantai dengan garis Pantai mengecil dan beberapa ekosistem Pantai hilang karena kegiatan pengerukan pasir Pantai.



Gambar 3. Peta zonasi Kawasan penambangan pasir ilegal.

Perubahan garis Pantai terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor alami seperti pasang surut gelombang pantai, kecepatan angin dan sedimentasi serta faktor manusia seperti penambangan pasir pantai dan kegiatan lain seperti Pembangunan sarana dan prasarana di daerah Pantai [9]. Untuk itu perlu adanya Tindakan pengendalian kegiatan penambangan ilegal, agar kerusakan Pantai Kampa tidak menjadi lebih luas dan menghilangkan lebih banyak lagi ekosistem Pantai Kampa. Selain Tindakan pengendalian perlu dilakukan pendampingan dan penguatan proses implementasi kebijakan yang mengatur tentang eksploitasi penambangan pasir di Pantai antara pemerintah dan Masyarakat serta pihak-pihak terkait [10]. Beberapa permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan penambangan ilegal antara lain adalah rusaknya ekosistem, kondisi jalan yang rusak, polusi udara, rusaknya sarana dan prasarana transportasi dan adanya konflik pada Masyarakat [11].

Pengendalian usaha penambangan Pasir ilegal di Pantai Kampa dilakukan dengan teknik analisis AHP yang diukur berdasarkan karakteristiknya. Skala prioritas merupakan kesimpulan dari hasil wawancara terhadap 5 responden yang memiliki pengaruh terhadap kegiatan penambangan ilegal di Pantai Kampa yaitu perwakilan dari perangkat desa, Dinal Lingkungan Hidup, BAPPEDA, ketua adat dan perwakilan dari akademisi.

Berikut adalah skala prioritas pengendalian yang menjadi rekomendasi dari hasil wawancara tersebut.

- Prioritas 1 : Melindungi dan menjaga serta mengembangkan potensi wisata pantai Kampa;
 Prioritas 2 : Peningkatan sarana prasarana Pantai Kampa.
 Prioritas 3 : Membuka peluang kerja baru dan mendorong kewirausahaan lokal (UMKM).

Adapun hasil analisis AHP yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan berpasangan level kriteria

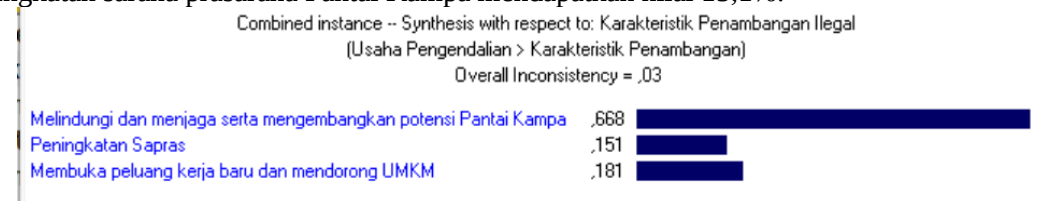
Prioritas antara karakteristik penambangan ilegal dan pengaruh penambangan ilegal didapatkan bahwa yang menjadi prioritas dalam pengendalian usaha penambangan pasir ilegal Pantai Kampa. Hal tersebut menunjukkan pengaruh kegiatan penambangan pasir ilegal mendapatkan nilai 75%, dan karakteristik Pantai Kampa 25%.



Gambar 4. Prioritas karakteristik penambangan Pantai Kampa dan pengaruh kegiatan penambangan ilegal

2. Perbandingan berpasangan pada kriteria karakteristik

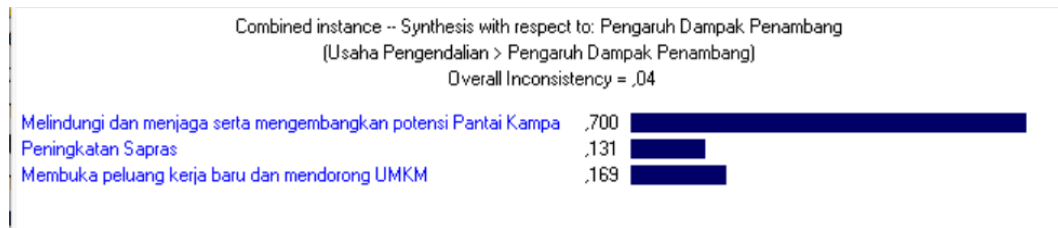
Hasil analisis dari karakteristik Pantai Kampa dengan perbandingan antara melindungi dan menjaga serta mengembangkan potensi Pantai Kampa, peningkatan sarana prasarana Pantai Kampa dan membuka peluang kerja baru dan mendorong UMKM. bahwa yang menjadi prioritas dalam pengendalian usaha penambangan pasir ilegal Pantai Kampa, yang mendapatkan prioritas utama adalah melindungi dan menjaga serta mengembangkan potensi Pantai Kampa dengan nilai 66,8%, yang kedua membuka peluang baru dan mendorong UMKM mendapatkan nilai 18,1%, sedangkan peningkatan sarana prasarana Pantai Kampa mendapatkan nilai 15,1%.



Gambar 5. Prioritas karakteristik, dengan perbandingan melindungi dan menjaga serta mengembangkan potensi Pantai Kampa dengan nilai, membuka peluang baru dan mendorong UMKM mendapatkan dan peningkatan sarana prasarana Pantai Kampa

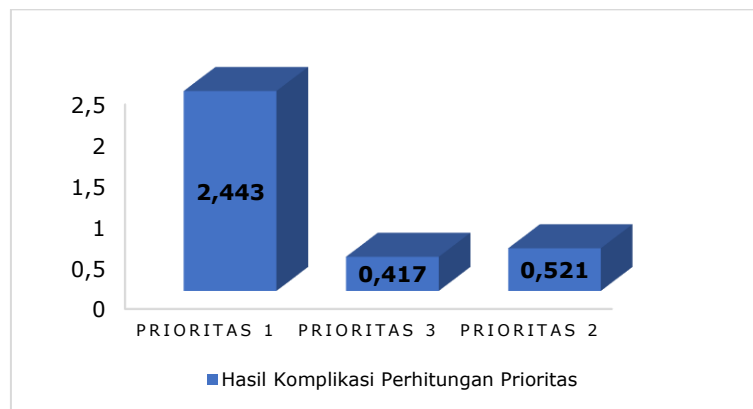
3. Perbandingan berpasangan pada kriteria pengaruh kegiatan penambangan pasir ilegal.

Hasil analisis dari pengaruh kegiatan penambangan pasir ilegal dengan perbandingan antara melindungi dan menjaga serta mengembangkan potensi Pantai Kampa, peningkatan sarana prasarana Pantai Kampa dan membuka peluang kerja baru dan mendorong UMKM. Bahwa yang menjadi prioritas dalam pengendalian usaha penambangan pasir ilegal Pantai Kampa, yang mendapatkan prioritas utama adalah melindungi dan menjaga serta mengembangkan potensi Pantai Kampa dengan nilai 70%, yang kedua membuka peluang baru dan mendorong UMKM mendapatkan nilai 16,9%, sedangkan peningkatan sarana prasarana Pantai Kampa mendapatkan nilai 13,1%.



Gambar 6. Prioritas pengaruh penambangan pasir ilegal, dengan perbandingan melindungi dan menjaga serta mengembangkan potensi Pantai Kampa dengan nilai, membuka peluang baru dan mendorong UMKM mendapatkan dan peningkatan sarana prasarana Pantai Kampa

Berdasarkan dari hasil 3 prioritas, selanjutnya dilakukan perhitungan komplikasi untuk melihat prioritas yang utama dalam pengendalian usaha penambangan pasir ilegal di Pantai Kampa. Dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Hasil Komplikasi Perhitungan Prioritas

Berdasarkan Gambar 7 dapat ditentukan urutan prioritas terkait dengan pengendalian penambangan pasir ilegal di Pantai Kampa sebagai berikut :

1. Prioritas 1, melindungi dan menjaga serta mengembangkan potensi wisata pantai Kampa sebesar 2,443 dengan melindungi serta mengembangkan Pantai Kampa akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan, serta dapat meningkatkan ekonomi Desa dengan adanya wisatawan yang datang
2. Prioritas 2, membuka peluang kerja baru dan mendorong kewirausahaan lokal (UMKM) 0,521 dengan adanya potensi wisata di Pantai Kampa di harapkan akan membuka mata pencaharian baru dalam mendukung masyarakat perekonomian masyarakat lokal.
3. Prioritas 3, meningkatkan sarana dan prasaran Pantai Kampa sebesar 0,417, dengan meningkatkan sarana prasaran penunjang di pantai kampa dapat memberikan kenyamanan dan keindahan tersendiri di Pantai Kampa.

Pantai Kampa memiliki potensi daya tarik wisata alam dengan keindahan laut dan pantai, berdasarkan dari tingkat prioritas, berdasarkan analisis AHP menyatakan bahwas 2,443 yang dominan adalah melindungi dan menjaga serta mengembangkan potensi wisata pantai Kampa. Dengan itu perlu adanya pengendalian usaha masyarakat dari pada kegiatan penambangan ilegal dan atau memberikan usaha baru (UMKM) untuk mendukung wisata di Pantai kampa dengan begitu mata pencaharian masyarakat berubah dari penambangan pasir ilegal menuju wisata yang berkelanjutan tentunya dengan memperhatikan sistem keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan penambangan pasir ilegal merupakan kegiatan yang dilakukan sejak lama dari tahun 1997 sampai sekarang, kegiatan tersebut merupakan kegiatan berskala mikro dengan jumlah penambang sebanyak 19 tim dengan metode penggalian yang digunakan secara tradisional, dengan alat seadanya dengan penghasilan seadanya dengan sistem manajemen keluarga, penghasil yang didapatkan perkarungnya bisa mencapai 1,5 ton, penjualan satu karungnya Rp.5.000. dan perbulanya bisa mencapai Rp.5.000.000 perbulanya. Pemerintah telah memberikan larangan praktik penambangan Pasir Ilegal dengan sosialisasi namun himbauan tidak dilakukan, dengan adanya kegiatan tersebut tentu memberikan pengaruh terhadap perekonomian penambang ilegal. Sehingga perlu adanya tindakan pengendalian melalui pendampingan dan penguatan proses implementasi kebijakan yang mengatur tentang eksploitasi penambangan pasir di Pantai antara pemerintah dan Masyarakat serta pihak-pihak terkait.

Aspek pendidikan merupakan aspek yang berpengaruh terjadinya kegiatan penambangan ilegal di pantai Kampa, sedangkan aspek pendapatan, mata pencarian, infrastruktur, peraturan manajemen pada memiliki kriteria cukup berpengaruh terhadap kegiatan penambangan ilegal masyarakat Desa Dete. Dengan melihat begitu banyaknya permasalahan yang ditimbulkan akibat kegiatan penambangan ilegal, perlu adanya pengendalian usaha penambangan ilegal tersebut. Usaha pengendalian ini dimasukkan ke dalam program pengembangan pembangunan Desa yang yang direncanakan perencanaanya dalam mengembangkan potensi wisata di Desa Dete. Beberapa bentuk pengendalian yaitu pertama melakukan kegiatan konservasi untuk melindungi dan menjaga ekosistem pantai kampa melalui program pengembangan potensi wisata pantai kampa. Kedua dengan membuka peluang kerja baru dan mendorong kewirausahaan lokal (UMKM) dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat penambang ilegal. Ketiga dengan meningkatkan sarana dan prasarana pantai Kampa sehingga dapat memberikan keamanan, kenyamanan masyarakat desa Dete dan menjaga serta mengembangkan keindahan pantai Kampa. Dengan begitu diharapkan kegiatan penambangan ilegal tidak lagi ada di pantai Kampa digantikan dengan kegiatan pariwisata.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Kepala Desa Dete yang telah memberikan ijin kepada peneliti untuk melakukan penelitian serta tidak lupa kepada para penambang di Pantai Kampa yang dengan sukarela memberikan informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. D. Nurcahyo, "Analisis Dampak Penambangan Pasir Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo," *J. Geogr. Geogr. dan Pengajarannya*, vol. 18, no. 2, 2020, [Online]. Available: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2068460>.
- [2] A. S. Moerwanto and T. Junoasmoro, "Strategi Pembangunan Infrastruktur Wisata Terintegrasi," *J. HPJI (Himpunan Pengemb. Jalan Indones.*, vol. 3, no. 2, 2017, [Online]. Available: <https://journal.unpar.ac.id/index.php/HPJI/article/view/2735>.
- [3] I. N. Radiarta, Erlania, and J. Haryadi, "Pengaruh Penambangan Pasir Laut Terhadap Kekeruhan Perairan Teluk Banten Serang," *Segara*, vol. 8, no. 2, pp. 65–150, 2018.
- [4] A. A. S. A. Widyastuty and M. E. Widiara, "Strengthening Natural Tourism Empowerment Construction through Brand Strategy - Based Online Marketplace," *J. Environ. Manag. Tour.*, vol. XIII, no. 6(62), 2022, [Online]. Available: <https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/7268>.
- [5] A. A. S. A. Widyastuty and I. M. B. Dwiarta, "Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata Kaba – Kaba Berbasis Kearifan Lokal," *J. Kawistara*, vol. 11, no. 1, p. 87, 2021, doi: 10.22146/kawistara.63535.
- [6] U. D. P. M. F. N. M. F. ; H. Asep, "Iklim Orgnisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi," vol. 1, no. 12, p. 6, 2021.
- [7] A. H. Suasapha, "Skala Likert Untuk Penelitian Pariwisata; Beberapa Catatan Untuk Menyusunnya Dengan Baik," *J. Kepariwisata*, vol. 19, no. 1, pp. 26–37, 2020, doi: 10.52352/jpar.v19i1.407.
- [8] Jadianan Parhusip, "Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Pada Desain Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kota Palangka Raya," *J. Teknol. Inf. J. Keilmuan dan Apl. Bid. Tek. Inform.*, vol. 13, no. 2, pp. 18–29, 2019, doi: 10.47111/jti.v13i2.251.

- [9] Rifardi, Mubarak, and D. Yoswaty, "Peningkatan kapasitas kesadaran masyarakat terhadap mitigasi kerusakan pantai di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai-Riau," 2020, [Online]. Available: <http://conference.unri.ac.id/index.php/unricsce/article/view/133/147>.
- [10] Y. Kabes, H. Ikhwan, and U. Listyaningsih, "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penambang Pasir di Wilayah Pesisir Kabupaten FakFak (Studi kasus Penambangan Pasir Ilegal di Pantai dan Perairan Pulau Panjang dan Pulau Ega)," Universitas Gadjah Mada, 2021.
- [11] R. As'ari, E. Mulyanie, and D. Rohmat, "Zonasi Pemanfaatan Lahan Pasca Penambangan Pasir di Pesisir Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat," *J. Geogr.*, vol. 11, no. 2, 2019, [Online]. Available: <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo/article/view/10712>.